BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis selama melakukan penelitian, maka terkait Efektivitas Kinerja Tim Koordinasi Penanganan anak tidak sekolah perlu perbaikan terkait Ketepatan waktu, pemahaman program kerja sama dan koordinasi Tim PPATS Provinsi Sulawesi selatan.

Pada menganalisis sejauh mana anggota Tim PPATS, dari berbagai OPD, memahami peran, mekanisme, dan teknologi program, serta bagaimana pemahaman tersebut memengaruhi kolaborasi dan alokasi sumber daya. Secara formal dan perencanaan, OPD anggota Tim PPATS (Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dll.) menunjukkan pemahaman yang memadai terhadap tujuan program. Pemahaman ini diterjemahkan menjadi dukungan anggaran/kegiatan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing OPD (misalnya, tagging anggaran yang dilakukan Bappelitbangda dan alokasi di Dinas Pendidikan sebesar Rp 6,7 Miliar).

Hal ini menunjukkan adanya komitmen kelembagaan terhadap Program PPATS Tujuan program (Aksi I-V) dan tugas formal (Tim Teknis dan Sekretariat) dipahami dengan baik oleh pimpinan/perwakilan OPD yang aktif. Ini terbukti dari adanya MONEV triwulan/persemester, di mana Tim mampu mengevaluasi 5 Aksi. adapun faktor penghambat

yaitu disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penguasaan teknis seperti yang di sampaiakn oleh ibu febriani mustomo gagal diimplementasi secara merata dan SDM yang terbatas. dan Alokasi Penganggaran yang tidak optimal dan tidak berkelanjutan untuk honor pendata. Perlunya peningkatan kolaborasi dan komitmen kelembagaan yang lebih kuat, terutama terkait dengan pendanaan.

Pada kecepatan dan kesesuaian waktu intervensi dengan membandingkan durasi proses (mulai dari pendataan, verifikasi, validasi, hingga pengembalian anak ke bangku sekolah) dengan linimasa (timeline) yang ditetapkan dalam Dokumen RA-PPATS atau Petunjuk Teknis Stranas ATS.yang dilakukan oleh Tim PPATS mulai dari saat anak teridentifikasi tidak sekolah hingga diberikan penanganan.

sesuia dengan hasil wawancara dengan Bapak Suryanto dengan menegaskan hasil wawancara Bapak Suryanto (UNICEF) bahwa Tim PPATS Provinsi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan linimasa atau timeline yang diatur dalam Stranas ATS.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Dinas Sosial (Bapak Khalid) dalam menciptakan Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk ATS/ABPS. Keberadaan program ini (yang bersifat nasional dan diprioritaskan di Sulsel) menunjukkan adanya Responsivitas dan Kecepatan Intervensi terhadap kebutuhan ATS, terutama di kelompok SMA/SMP (150-100 orang). Adapun yang menjadi Faktor penghambat dalam indiktor Ketepatan Waktu, adanya kelambatan di tingkat implementasi dan

alokasi sumber daya, temuan Kunci (Wawancara Bapak Ahmad Abu, PMD): Kurangnya pendanaan untuk pendata ATS dan perlunya penggerak di setiap desa. Hal ini berbanding lurus dengan masalah anggaran honor 6,7 Miliar di Dinas Pendidikan yang belum terealisasi karena menunggu usulan nama pendata.

Keterlambatan alokasi dana ini menyebabkan proses di Tahap 1 (pendataan) dan Tahap 2 (rekonfirmasi) tidak efisien. Meskipun timeline formalnya berjalan, efisiensi waktu intervensi terganggu karena pendata tidak termotivasi/tidak didukung secara finansial untuk menyelesaikan verifikasi dengan cepat.

Permasalah yang paling terlihat disebabkan karena Koordinasi dan sinergi antara Organisasi Perangkat daerah (OPD) anggota Tim yang lemah, Pemanfaatan system data (Aplikasi Pasti Beraksi) yang belum merata di seluruh Perangkat daerah,serta Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam Penguasaan Teknologi Program, meskipun telah berhasil mengidentifikasi Ribuan anak tidak sekolah (ATS), ketidak optimalan ini tercermin dari rendahnya angka pengemablian ATS kebangku sekolah dibandingkan total anak yang teridentifikasi oleh karena itu efektivitas kinerja Tim PPATS sangat bergantung pada peningkatan komitmen kelembagaan integrasi sistem data, dan penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.

B. Rekomendasi

Memuat sasaran strategi untuk pemerintah provinsi Sulawesi selatan khususnya Tim PPATS, agar dapat memberikan penguatan komitmen kelembagaan dengan surat edaran kepala bappelitbangda selaku Tim sekretariat PPATS untuk mengeluarkan surat edaran resmi mewajibkan partisipasi aktif dan alokasi anggaran yang memadai dari setiap OPD terkait, khususnya untuk insentif pendataan di tingkat desa/kelurahan guna menjamin keberlanjutan program secara kolektif dan mandiri.

Perlu adanya integrasi dan penggunaan data dimana Tim PPATS menyinkronkan data antara aplikasi PASTI BERAKSI dengan sistem DAPODIK melalui mekanisme rekonsiliasi data bulanan, bertujuan untuk memastikan setiap intervensi penanganan didasarkan pada data yang akurat dan terverifikasi status sekolahnya, serta peningkatan kapasitas SDM untuk secara rutin dan massif menyelenggarakan pelatihan teknis aplikasi PASTI BERAKSI kepada minimal dua orang dari setiap OPD untuk menjamin transfer pengetahuan dan koordinasi internal yang efektif

Strategi Keberlanjutan Program (Pasca-UNICEF), Mengingat berakhirnya kemitraan dengan UNICEF pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi harus segera menyusun Strategi Keluar (Exit Strategy) yang dilegalkan. Strategi ini harus mencakup institusionalisasi anggaran permanen di APBD Provinsi untuk operasional program dan pemeliharaan sistem data.

C. Produk Tesis

Dalam penelitian ini penulis akan membuat produk Tesis berupa Policy Brief dengan Berjudul Sinergi Kuat, Kinerja Tim PPATS Efektif. Rekomendasi Kebijakan tentang sinergi Lintas sektor, data dan keberlanjutan anggaran untuk efektivitas Tim PPATS dan memberikan solusi terkait sinergi dan komitmen, Policy Brief ini ditujukan kepada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi selatan Selaku Tim Sekretariat PPATS. Policy Brief ini berisi Tentang Rekomendasi Kebijakan untuk mengatasi masalah Kolaborasi Bersama yang berfokus pada pendataan ATS, Pengembalian ATS ke sekolah Formal dan Non Formal serta Pencegahan anak yang beresiko putus sekolah, integrasi isu ATS yang harus tercantum pada program kegiatan perangkat Daerah Terkait yang termuat dalam DPA Perangkat daerah, Ketegasan dan Komitmen Kepala Daerah ini diperlukan dan komitmen dari kepala daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja OPD dalam mendukung penanganan ATS, termasuk Sanksi dan apresiasi yang jelas pada OPD yang berkinerja. Penguatan SDM dan Anggaran, Penguatan SDM dan pengalokasian anggaran yang tepat, khususnya untuk Honor pendata, guna mendukung verifikasi ke setiap rumah tangga di level desa/kelurahan, yang juga akan memfasilitasi pembentukan Tim Pendata SIPBM dan pelatihan.